



Proyeksikan Parkir Tepi Jalan Rp 65 M

Komitmen Dishub Surabaya saat Rapat APBD 2024

SURABAYA - Dinas perhubungan (dishub) menjawab desakan publik untuk memaksimalkan potensi pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU). Hal itu dilakukan dengan menaikkan target pendapatan menjadi Rp 65 miliar pada APBD 2024. Naik Rp 5 miliar jika dibandingkan target tahun ini, yaitu Rp 60 miliar.

Kadishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menyatakan, untuk mencapai target itu, pihaknya bakal memaksimalkan pengawasan di lapangan. Petugas akan lebih banyak turun mengawasi jukir di tempat-



OPTIMISTIS: Kepala Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru (kiri) menyampaikan target pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU) APBD 2024 dalam rapat bersama Komisi C DPRD Surabaya kemarin (24/10).

tempat ramai.

Dari situ, bakal diketahui potensi pendapatan retribusi dibanding dengan yang disetorkan ke pemkot. Langkah ini untuk mencegah kebocoran pendapatan. "Tahun depan pengaturan lebih baik. Pengawasan tempat parkir akan lebih

ketat," ujar Tundjung setelah rapat APBD 2024 bersama Komisi C DPRD Kota Surabaya kemarin (24/10).

Hasil kajian Guru Besar Unair Prof Badri Munir Sukoco tentang potensi pendapatan parkir TJU Rp 1,2 triliun-Rp 2,4 triliun juga sempat dibahas pada rapat

Tahun depan pengaturan lebih baik. Pengawasan tempat parkir akan lebih ketat."

TUNDJUNG ISWANDARU
Kepala Dishub Surabaya

kemarin. Namun, Tundjung mengaku tidak berwenang menanggapi hasil kajian itu. "Mungkin terlalu bombastis juga," ucapnya, lalu tertawa.

Ketua Komisi C Baktiono menilai target retribusi TJU senilai Rp 65 miliar cukup ideal. Sebab, dalam APBD 2023 murni target pendapatan parkir TJU Rp 35 miliar. Lantas, pada APBD Perubahan 2023 yang ditetapkan awal Oktober lalu naik menjadi Rp 60 miliar.

"Target ini sudah cukup baik," katanya.

Ditegaskan, dishub harus menambah titik parkir baru yang potensial. Kawasan parkir yang selama ini dikelola pihak ketiga harus diambil alih. Di antaranya, parkir di depan RSUD dr M. Soewandhie, kawasan religi Sunan Ampel, dan Jalan Manyar Kertoarjo.

Kawasan parkir religi Sunan Ampel, misalnya. Selama ini, kawasan itu dikelola kelompok masyarakat setempat. Hasil parkir tidak disetor menjadi pendapatan daerah.

Apalagi, tarif parkir yang ditarik ke pengunjung cukup tinggi. "Ini hasil pengawasan kami di komisi C yang sering turun ke lapangan," jelas anggota komisi C William Wira-kusuma. **(mar/c18/jun)**